

DAFTAR RENCANA AKSI HASIL SURVEY 2025
TINDAK LANJUT INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

INTERNAL

1. INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS

- Prioritas

NO	SKOR - LEVEL RISIKO	DASAR PENYUSUNAN RENAKSI	RENCANA AKSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	RENCANA DATA DUKUNG
1	51.46 - Sangat Tinggi	Indikator: Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Diungkap Akar Masalah: Mekanisme WBS tidak berjalan dengan baik Rekomendasi: Review secara menyeluruh terhadap mekanisme WBS	[IDEAL] 1. Pelaksanaan evaluasi komprehensif efektivitas sistem WBS menggunakan data analytics. 2. Pembangunan atau penguatan aplikasi Whistleblowing System (WBS) instansi dengan fitur perlindungan kerahasiaan pelapor dan akses 24/7. 3. Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran dengan prosedur penanganan laporan yang jelas dan terukur. 4. Penetapan tim pengelola WBS yang kompeten dan memiliki kewenangan yang jelas. 5. Pembuatan dashboard pemantauan status laporan WBS yang dapat diakses oleh Inspektorat/Satuan Pengawas Internal. 6. Sosialisasi WBS secara masif kepada pegawai, pengguna layanan, mitra penyedia, NGO, dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai kanal digital. [DIREKOMENDASIKAN]	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Progress 1 : 1. SK Tim Pengelola WBS dengan struktur, kewenangan, dan jalur pelaporan yang independen. 2. Kebijakan zero tolerance dan SOP penanganan pelanggaran dengan batas waktu respons dan eskalasi otomatis. 3. Rancangan aplikasi WBS dengan fitur enkripsi identitas, nomor tiket unik, akses 24/7 melalui browser dan mobile. 4. Rancangan dashboard pemantauan status laporan yang dapat diakses Inspektorat/APIP. 5. Strategi komunikasi sosialisasi WBS kepada pemangku kepentingan (pegawai, pengguna layanan, mitra penyedia, NGO). Progress 2 : 1. Aplikasi WBS yang sudah dibangun dengan fitur kerahasiaan, nomor tiket, dan akses multi-channel. 2. Dashboard pemantauan status laporan versi awal yang sudah dapat diakses Inspektorat/APIP. 3. Laporan uji coba aplikasi WBS dengan kelompok pilot dan rencana perbaikan. 4. Materi sosialisasi WBS untuk berbagai segmen pemangku kepentingan. 5. Bukti uji penetrasi (penetration test) keamanan sistem untuk menjamin perlindungan identitas pelapor. Progress 3 : 1. Aplikasi WBS yang sudah aktif beroperasi 24/7 dengan rekapitulasi laporan yang masuk dan diproses. 2. Dashboard pemantauan status laporan real-time yang aktif di Inspektorat/APIP. 3. Rekapitulasi sosialisasi WBS yang dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui kanal digital. 4. Bukti eskalasi otomatis laporan yang melampaui batas waktu respons. 5. Bukti tindak lanjut kasus pelanggaran yang dilaporkan melalui WBS. Progress 4 : 1. Laporan evaluasi komprehensif efektivitas WBS dengan metodologi data analytics (jumlah laporan masuk vs diproses, waktu penanganan rata-rata, tingkat kepuasan pelapor). 2. Hasil benchmarking dengan WBS instansi lain atau standar nasional. 3. Rekapitulasi tindak lanjut kasus pelanggaran yang dilaporkan dan sanksi yang dijatuhkan. 4. Rencana pemutakhiran aplikasi WBS dan strategi komunikasi tahun berikutnya. 5. Laporan tahunan pelaksanaan WBS kepada pimpinan dan publikasi statistik kepada publik (tanpa identitas pelapor).

NO	SKOR - LEVEL RISIKO	DASAR PENYUSUNAN RENAKSI	RENCANA AKSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	RENCANA DATA DUKUNG
2	71.23 - Sangat Tinggi	Indikator: Nepotisme Akar Masalah: Tidak adanya kebijakan atau regulasi yang melarang perdagangan pengaruh Rekomendasi: Adanya larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan.	[SEMI IDEAL] 1. Implementasi aturan pengelolaan konflik kepentingan di instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru. 2. Kewajiban unggah deklarasi kepentingan format digital ke penyimpanan cloud instansi pada periode tertentu.. 3. Pewajiban pengisian formulir deklarasi kepatuhan digital sebagai lampiran berkas setiap proses terkait. 4. Penunjukan satu koordinator di unit terkait untuk mengelola kepatuhan dan rekapitulasi data dan tempat konsultasi pengambilan keputusan. 5. Penyusunan bentuk reward and punishment untuk pegawai yang belum melakukan deklarasi konflik kepentingan. 6. Integrasi modul pelatihan daring terkait pengelolaan konflik kepentingan dengan studi kasus konflik kepentingan.	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2. Sekretariat Daerah 3. Inspektorat	Progress 1 : 1. TW1 — Persiapan: 2. SK Tim Penyusun Kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Tim Pengelola Cloud Deklarasi. 3. Kebijakan pengelolaan konflik kepentingan instansi yang sudah disahkan, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. 4. SK Penunjukan koordinator pengelola konflik kepentingan di setiap unit kerja. 5. Format formulir deklarasi konflik kepentingan digital sederhana dan format formulir deklarasi kepatuhan digital sebagai lampiran wajib berkas setiap proses terkait. 6. Kebijakan reward and punishment untuk kepatuhan deklarasi konflik kepentingan. Progress 2 : 1. TW2 — Pelaksanaan Semester 1: 2. Bukti unggah deklarasi konflik kepentingan format digital ke penyimpanan cloud instansi oleh pegawai sesuai periode yang ditetapkan. 3. Rekapitulasi semester 1 kepatuhan pengisian formulir deklarasi kepatuhan digital sebagai lampiran berkas proses (pengadaan, promosi/mutasi, penyaluran bantuan). 4. Bukti penyelenggaraan modul pelatihan daring pengelolaan konflik kepentingan semester 1 dengan studi kasus konflik kepentingan. 5. Daftar konsultasi pengambilan keputusan yang difasilitasi koordinator unit kerja dan ditindaklanjuti. 6. Bukti penjatihan sanksi administratif atau insentif bagi pegawai berdasarkan kebijakan reward and punishment. Progress 3 : 1. TW3 — Pelaksanaan Semester 2: 2. Bukti unggah deklarasi konflik kepentingan format digital ke cloud semester 2 dan rekapitulasi kumulatif kepatuhan. 3. Rekapitulasi kumulatif kepatuhan pengisian formulir deklarasi kepatuhan digital sebagai lampiran berkas proses. 4. Bukti penyelenggaraan modul pelatihan daring pengelolaan konflik kepentingan semester 2. 5. Rekapitulasi konsultasi dan tindak lanjut konflik kepentingan yang ditangani koordinator unit kerja. 6. Bukti penjatihan reward and punishment kumulatif untuk kepatuhan deklarasi konflik kepentingan. Progress 4 : 1. TW4 — Evaluasi & Pelaporan Tahunan: 2. Laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan instansi yang memuat rekapitulasi seluruh deklarasi, kasus, dan tindak lanjut. 3. Laporan evaluasi efektivitas kebijakan reward and punishment dan rekomendasi penyempurnaan. 4. Rencana penyempurnaan kebijakan dan modul pelatihan tahun berikutnya. 5. Bukti distribusi laporan kepada pimpinan dan Inspektorat/Satuan Pengawas Internal.

2. PENGELOLAAN ANGGARAN

- Prioritas

NO	SKOR - LEVEL RISIKO	DASAR PENYUSUNAN RENAKSI	RENCANA AKSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	RENCANA DATA DUKUNG
----	---------------------------	--------------------------------	--------------	-----------------------------------	---------------------

NO	SKOR - LEVEL RISIKO	DASAR PENYUSUNAN RENAKSI	RENCANA AKSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	RENCANA DATA DUKUNG
1	75.58 - Sangat Tinggi	Indikator: Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat Akar Masalah: Sistem pangajuan anggaran yang masih manual belum digital Rekomendasi: Pengembangan platform digital pengajuan anggaran,	[SEMI IDEAL] 1. Penyusunan dan pengesahan standar biaya internal instansi sebagai acuan wajib dalam pengajuan anggaran. 2. Pemanfaatan sistem pengajuan anggaran digital secara konsisten oleh seluruh unit kerja. 3. Penyusunan SOP pengelolaan anggaran yang mencakup perencanaan, pengajuan, persetujuan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 4. Penyediaan akses dashboard realisasi anggaran kepada pimpinan dan unit kerja terkait. 5. Pelaksanaan audit internal berkala oleh Inspektorat/Satuan Pengawas Internal terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. 6. Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap penyalahgunaan anggaran dengan mekanisme penanganan kasus yang jelas.	1. Sekretariat Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 4. Inspektorat	Progress 1 : 1. TW1 — Persiapan: 2. SK Tim Penyusun Standar Biaya Internal dan SOP Pengelolaan Anggaran. 3. Standar biaya internal yang melengkapi standar biaya nasional untuk jenis belanja yang belum tercakup, sudah disahkan pimpinan. 4. SOP pengelolaan anggaran yang memuat alur lengkap dari perencanaan, pengajuan, persetujuan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dengan batas waktu dan dokumen pendukung. 5. Kebijakan zero tolerance pimpinan dan surat edaran tentang larangan pengajuan manual kecuali kondisi darurat tertulis. 6. Akses dashboard realisasi anggaran kepada pimpinan dan unit kerja terkait melalui sistem yang sudah ada. Progress 2 : 1. TW2 — Pelaksanaan Semester 1: 2. Bukti distribusi standar biaya internal kepada seluruh unit kerja sebagai acuan wajib dalam pengajuan anggaran. 3. Rekapitulasi pengajuan anggaran melalui sistem digital semester 1 dengan pelarangan pengajuan manual. 4. Laporan triwulanan realisasi anggaran kepada pimpinan dengan rekapitulasi belanja per unit kerja dan jenis belanja. 5. Bukti pelaksanaan audit internal berkala oleh Inspektorat/APIP terhadap pelaporan anggaran semester 1 dengan tindak lanjut temuan. Progress 3 : 1. TW3 — Pelaksanaan Semester 2: 2. Bukti pelaksanaan SOP pengelolaan anggaran secara konsisten oleh seluruh unit kerja semester 2. 3. Rekapitulasi pengajuan anggaran melalui sistem digital semester 2 dengan analisis kepatuhan. 4. Laporan triwulanan realisasi anggaran kepada pimpinan dengan tindak lanjut temuan audit yang dipantau hingga selesai. 5. Bukti pelaksanaan sidang disiplin dan SK sanksi administratif terhadap kasus penyalahgunaan anggaran (jika ada). Progress 4 : 1. TW4 — Evaluasi & Pelaporan Tahunan: 2. Laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan anggaran berbasis standar biaya internal dan SOP. 3. Hasil evaluasi efektivitas SOP pengelolaan anggaran dan rencana penyempurnaan. 4. Rekapitulasi tindak lanjut temuan audit dan kasus penyalahgunaan anggaran sepanjang tahun. 5. Rencana pemutakhiran standar biaya internal dan SOP tahun berikutnya.

3. PENGELOLAAN SDM

- Prioritas

NO	SKOR - LEVEL RISIKO	DASAR PENYUSUNAN RENAKSI	RENCANA AKSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	RENCANA DATA DUKUNG
----	---------------------------	--------------------------------	--------------	-----------------------------------	---------------------

NO	SKOR - LEVEL RISIKO	DASAR PENYUSUNAN RENAKSI	RENCANA AKSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	RENCANA DATA DUKUNG
1	68.1 - Tinggi	Indikator: Pengaruh keberabatan pada promosi dan mutasi Akar Masalah: Terjadi intervensi dari Pejabat yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dan ASN tidak berani menolaknya. Rekomendasi: Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem WBS yang mampu mendorong ASN berani menyampaikan pengaduan.	[IDEAL] 1. Pelaksanaan evaluasi komprehensif efektivitas sistem WBS menggunakan data analytics. 2. Pembangunan atau penguatan aplikasi Whistleblowing System (WBS) instansi dengan fitur perlindungan kerahasiaan pelapor dan akses 24/7. 3. Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran dengan prosedur penanganan laporan yang jelas dan terukur. 4. Penetapan tim pengelola WBS yang kompeten dan memiliki kewenangan yang jelas. 5. Pembuatan dashboard pemantauan status laporan WBS yang dapat diakses oleh Inspektorat/Satuan Pengawas Internal. 6. Sosialisasi WBS secara masif kepada pegawai, pengguna layanan, mitra penyedia, NGO, dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai kanal digital. [DIREKOMENDASIKAN]	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Progress 1 : 1. SK Tim Pengelola WBS dengan struktur, kewenangan, dan jalur pelaporan yang independen. 2. Kebijakan zero tolerance dan SOP penanganan pelanggaran dengan batas waktu respons dan eskalasi otomatis. 3. Rancangan aplikasi WBS dengan fitur enkripsi identitas, nomor tiket unik, akses 24/7 melalui browser dan mobile. 4. Rancangan dashboard pemantauan status laporan yang dapat diakses Inspektorat/APIP. 5. Strategi komunikasi sosialisasi WBS kepada pemangku kepentingan (pegawai, pengguna layanan, mitra penyedia, NGO). Progress 2 : 1. Aplikasi WBS yang sudah dibangun dengan fitur kerahasiaan, nomor tiket, dan akses multi-channel. 2. Dashboard pemantauan status laporan versi awal yang sudah dapat diakses Inspektorat/APIP. 3. Laporan uji coba aplikasi WBS dengan kelompok pilot dan rencana perbaikan. 4. Materi sosialisasi WBS untuk berbagai segmen pemangku kepentingan. 5. Bukti uji penetrasi (penetration test) keamanan sistem untuk menjamin perlindungan identitas pelapor. Progress 3 : 1. Aplikasi WBS yang sudah aktif beroperasi 24/7 dengan rekapitulasi laporan yang masuk dan diproses. 2. Dashboard pemantauan status laporan real-time yang aktif di Inspektorat/APIP. 3. Rekapitulasi sosialisasi WBS yang dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui kanal digital. 4. Bukti eskalasi otomatis laporan yang melampaui batas waktu respons. 5. Bukti tindak lanjut kasus pelanggaran yang dilaporkan melalui WBS. Progress 4 : 1. Laporan evaluasi komprehensif efektivitas WBS dengan metodologi data analytics (jumlah laporan masuk vs diproses, waktu penanganan rata-rata, tingkat kepuasan pelapor). 2. Hasil benchmarking dengan WBS instansi lain atau standar nasional. 3. Rekapitulasi tindak lanjut kasus pelanggaran yang dilaporkan dan sanksi yang dijatuhkan. 4. Rencana pemutakhiran aplikasi WBS dan strategi komunikasi tahun berikutnya. 5. Laporan tahunan pelaksanaan WBS kepada pimpinan dan publikasi statistik kepada publik (tanpa identitas pelapor).

4. PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE)

- Prioritas

NO	SKOR - LEVEL RISIKO	DASAR PENYUSUNAN RENAKSI	RENCANA AKSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	RENCANA DATA DUKUNG
----	---------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	---------------------

NO	SKOR - LEVEL RISIKO	DASAR PENYUSUNAN RENAKSI	RENCANA AKSI	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	RENCANA DATA DUKUNG
1	72.98 - Tinggi	Indikator: Negosiasi Sanksi/Denda Akar Masalah: Mekanisme sanksi/denda belum memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong transparansi Rekomendasi: Pengembangan aplikasi teknologi untuk mekanisme denda secara elektronik	[IDEAL] 1. Pembangunan sistem perizinan dan rekomendasi teknis berbasis elektronik yang terintegrasi dengan platform perizinan nasional. 2. Penerapan pemisahan antara petugas pemroses dan pemohon melalui distribusi berkas secara otomatis serta komunikasi layanan melalui platform digital. 3. Integrasi sistem perizinan dengan database eksternal untuk verifikasi otomatis kelengkapan dan kebenaran data pemohon. 4. Pembangunan sistem pengawasan kepatuhan pasca-perizinan berbasis teknologi untuk memantau pelaksanaan kewajiban pemegang izin. 5. Penerapan sistem sanksi administratif terintegrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin atau rekomendasi teknis. 6. Publikasi daftar pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif melalui portal resmi instansi. [DIREKOMENDASIKAN]	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Sekretariat Daerah 3. Inspektorat 4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Progress 1 : 1. TW1 — Persiapan & Desain: 2. SK Tim Pengembang Sistem Perizinan dan Rekomendasi Teknis Elektronik Terintegrasi dengan Tim Pengelola Distribusi Otomatis Berkas. 3. Kebijakan/SK Pimpinan tentang penerapan sistem perizinan dan rekomendasi teknis berbasis elektronik yang terintegrasi dengan platform perizinan nasional dan kewajiban distribusi otomatis berkas berbasis algoritma acak atau beban kerja. 4. Rancangan sistem perizinan dan rekomendasi teknis berbasis elektronik dengan modul pendaftaran mandiri pemohon, alur kerja terstruktur, modul deklarasi konflik kepentingan petugas, dan pengalihan otomatis berkas bila terdeteksi keterhubungan antara petugas dan pemohon. 5. MoU/Permohonan akses dengan pengelola platform perizinan nasional (OSS atau sistem perizinan terpadu lainnya) dan database verifikasi eksternal (Dukcapil, beneficial ownership AHU, DJP, status perizinan terkait). 6. Rancangan sistem pengawasan kepatuhan pasca-perizinan dengan modul pelaporan berkala wajib oleh pelaku usaha, inspeksi lapangan berbasis risiko dengan dokumentasi digital, dan deteksi otomatis pelanggaran. 7. Rancangan sistem sanksi administratif terintegrasi dan otomatis (peringatan tertulis dengan tenggat perbaikan, denda administratif, pembekuan sementara, pencabutan permanen) dengan eksekusi otomatis berdasarkan bukti pelanggaran terdokumentasi. 8. MoU/koordinasi lintas instansi dengan asosiasi industri, lembaga sertifikasi, dan instansi penerbit izin terkait agar sanksi konsisten dan tidak dapat dilemahkan melalui koneksi pejabat. Progress 2 : 1. TW2 — Pengembangan & Uji Coba: 2. Sistem perizinan dan rekomendasi teknis berbasis elektronik versi awal yang sudah dapat diakses pemohon dengan data uji coba. 3. Bukti integrasi distribusi otomatis berkas berbasis algoritma acak atau beban kerja sehingga pemohon tidak dapat memilih petugas tertentu dan pejabat senior tidak dapat mengarahkan berkas. 4. Bukti integrasi sistem perizinan dengan database verifikasi eksternal (Dukcapil, beneficial ownership AHU, DJP, riwayat kepatuhan pajak, status perizinan terkait) untuk verifikasi otomatis kelengkapan dan kebenaran data pemohon. 5. Sistem pengawasan kepatuhan pasca-perizinan versi awal yang sudah aktif dengan modul pelaporan berkala wajib dan inspeksi lapangan berbasis risiko. 6. Bukti integrasi sistem sanksi administratif dengan sistem perizinan dengan mekanisme eksekusi otomatis bertingkat berdasarkan bukti pelanggaran terdokumentasi. 7. Bukti penyelesaian MoU lintas instansi dengan asosiasi industri, lembaga sertifikasi, dan instansi penerbit izin terkait. Progress 3 : 1. TW3 — Implementasi Penuh: 2. Rekapitulasi otomatis permohonan izin yang diajukan secara mandiri oleh pemohon, persentase distribusi otomatis berkas, dan rekapitulasi pengalihan otomatis berkas akibat deteksi konflik kepentingan. 3. Rekapitulasi otomatis verifikasi data pemohon terhadap database verifikasi eksternal dan rekapitulasi permohonan yang ditolak karena ketidaksesuaian data. 4. Rekapitulasi otomatis pelaporan berkala oleh pelaku usaha, inspeksi lapangan berbasis risiko yang dilaksanakan, dan deteksi otomatis pelanggaran (kegiatan tanpa izin, pelampauan kapasitas, penyimpangan teknis, kelalaian pelaporan). 5. Rekapitulasi otomatis sanksi administratif yang dieksekusi bertingkat (peringatan, denda, pembekuan, pencabutan) tanpa intervensi manual. 6. Rekapitulasi publikasi terbuka daftar pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif beserta jenis pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan melalui portal resmi instansi, dengan koordinasi lintas instansi. Progress 4 : 1. TW4 — Evaluasi & Pelaporan Tahunan: 2. Laporan tahunan pelaksanaan sistem perizinan dan denda elektronik terintegrasi yang memuat rekapitulasi permohonan, verifikasi, sanksi administratif, dan koordinasi lintas instansi. 3. Laporan evaluasi efektivitas sistem berbasis indikator terukur (rata-rata waktu penerbitan izin, persentase distribusi otomatis, persentase deteksi pelanggaran pasca-perizinan, persentase eksekusi sanksi otomatis, tingkat akuntabilitas publik dari publikasi sanksi). 4. Rencana pemutakhiran sistem perizinan dan algoritma deteksi pelanggaran tahun berikutnya. 5. Berita acara evaluasi tahunan MoU lintas instansi dan rencana penguatan konsistensi sanksi. 6. Bukti publikasi laporan tahunan sebagai bagian dari akuntabilitas publik instansi.

Ditandatangani oleh, ... / Juni / 2026

TTD

(.....)